

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Tahun Sidang

2020-2021

Masa Persidangan

: IV

Rapat ke

: 3 (tiga)

Jenis Rapat

: Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat

Dengar Pendapat Umum dilaksanakan secara tatap

muka dan virtual

Dengan

: 1. Menteri Kesehatan RI;

2. Menteri Ketenagakerjaan RI;

3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM);

5. Direktur Utama PT. Bio Farma:

6. Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia

(KADIN);

7: Pengurus (APINDO).

Asosiasi

Pengusaha

Indonesia

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/tanggal

: Senin, 15 Maret 2021

Puku!

: 10.30 WIB - selesai

Acara

: 1. Penjelasan tentang Evaluasi Upaya Penanggulangan Covid-19 selama satu tahun

terakhir;

 Penjelasan tentang perkembangan pelaksanaan Vaksinasi Program dan skema Vaksinasi Gotong Royong termasuk kesiapan Sistem Informasi Satu

Data Fasilitas Kesehatan;

3. Penjelasan tentang ketersediaan Vaksin Program

dan Vaksin Gotong Royong.

Ketua Rapat

: Felly Estelita Runtuwene, SE. / Ketua Komisi IX DPR RI

Dilanjukan oleh : Charles Honoris/ Wakil Ketua Komisi

IX DPR RI

Sekretaris Rapat

: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX

DPR RI

Tempat

: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Peserta Rapat Hadir dan Virtual : A. Fisik 23 orang Virtual 19 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;

B. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, beserta jajaran;

C. Menteri Ketenagakerjaan RI: DR. Hj. Ida Fauziah, M.Si., beserta jajaran;

D. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19: Letjen TNI Doni Monardo;

E. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP., beserta iaiaran:

F. Direktur Utama PT. Bio Farma: Honesti Basyir;

G. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN): Rosan Roeslani;

H. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO): Shinta Wijaya Kamdani.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Satuan Tugas Penangan Covid-19, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktur Utama PT Bio Farma, Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dibuka pukul 10.50 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

- Dalam rangka percepatan pengendalian pandemi COVID-19, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Satgas Penanganan COVID-19 segera mengevaluasi kebijakan teknis penanganan COVID-19 dengan memperhatikan masukan Komisi IX DPR RI sebagai berikut:
 - a. memperluas cakupan *testing* dan *tracing*, termasuk meningkatkan jumlah tenaga tracer dengan target 30 tenaga per 100.000 penduduk;
 - b. mempercepat proses testing dengan memastikan ketersediaan peralatan testing dan tenaga laboratorium di seluruh laboratorium rujukan nasional;

- c. memastikan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk penanganan COVID-19 di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19;
- d. mengintensifkan surveilen varian baru virus COVID-19 melalui penyelidikan epidemiologi secara ketat dan meningkatkan pengawasan pada pintu-pintu masuk ke Indonesia; dan
- e. meningkatkan kualitas komunikasi publik ke masyarakat.
- 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama Badan POM RI dan PT Biofarma untuk mengakselerasi program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai herd immunity, dengan:
 - a. memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 dengan jenis sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/ Menkes/12758/2020;
 - b. optimalisasi satu data vaksinasi COVID-19 untuk meminimalisir permasalahan teknis vaksinasi di lapangan;
 - c. memastikan kehalalan vaksin bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum digunakan dalam program vaksinasi; dan
 - d. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, termasuk penjelasan tentang Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
- 3. Guna mempersiapkan kebijakan vaksin Gotong Royong dan pelaksanaannya, Komisi IX DPR RI mendesak:
 - a. Kementerian Kesehatan RI untuk melibatkan Kementerian BUMN RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Badan POM RI dalam menyusun roadmap dan kebijakan teknis vaksinasi gotong royong;
 - Kementerian Kesehatan RI untuk melibatkan Kementerian BUMN RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin, Apindo serta instansi terkait lainnya dalam pendataan pekerja dan keluarganya; dan
 - c. Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memastikan pelaksanaan vaksin gotong royong diberikan tepat sasaran dan tanpa dikenakan biaya.
- 4. Komisi IX DPR RI mengapresiasi upaya Kadin dan Apindo dalam memfasilitasi perusahaan swasta skala menengah dan kecil dan UMKM guna menyukseskan program vaksin gotong royong sebagai bagian dari pelindungan bagi pekerja.
- 5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera menyelesaikan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19, baik pusat dan daerah serta menyelesaikan permasalahan klaim COVID-19 rumah sakit.
- 6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini paling lambat tanggal 24 Maret 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.35 WIB.

Jakarta, 15 Maret 2021

KETUA RAPAT/ WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

CHARLES HONORIS A-162